

Pj Gubernur DKI Minta Aparat Waspada Banjir Rob

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengimbau aparat wilayah agar waspada terhadap potensi banjir rob, akhir pekan ini. Hal itu sebagaimana diumumkan Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa akan terjadi gelombang air laut tinggi akibat fenomena bulan purnama pada 6 Januari mendatang.

Aparat wilayah harus segera menyiapkan alat-alat serta petugas untuk meminimalisir dampak banjir rob. Pemprov DKI telah memiliki peta kerawanan banjir termasuk yang diakibatkan oleh banjir rob. Masyarakat pun diimbau waspada dan selalu memperbarui informasi terkait potensi banjir rob di wilayahnya masing-masing.

“Tentunya Pemda saya

imbau juga dengan masyarakat selalu membaca imbauan BMKG. Terkait kesiapannya tentu kami sudah siapkan beberapa pompa yang sudah standby,” ungkap Heru usai meninjau kesiapan alat Dinas Bina Marga di Jakarta Timur, Rabu (4/1).

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Sekda DKI Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Afan Adriansyah Idris mengatakan, penanganan banjir rob sama seperti yang dilakukan pada banjir di tengah daratan Jakarta.

“BPBD ini sudah menginfokan juga ke rekan-rekan wilayah, dan dari rekan-rekan wilayah itu juga sudah menginfokan juga ke masyarakat yang terdampak untuk bersiap-siap. Semua sudah lengkap semua,” tukasnya. ● yan

Pemprov DKI Targetkan Langit Ibu Kota Bebas Kabel pada 2027

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan langit Ibu Kota akan terbebas dari kabel pada 2026 atau 2027.

Kabel listrik dan kabel lainnya, kecuali kabel penerangan jalan umum, akan dipindah ke dalam tanah. Jaringan kabel yang beroperasi di bawah tanah bernama sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT).

“Tiang PLN, tiang yang lain, semua kita cabut. Jadi, yang ada (di atas tanah) hanya lampu saja, nanti tidak ada lagi masalah tiang-tiang itu,” ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta Timur, Rabu (4/1).

“Target saya, 4-5 tahun

nanti Insya Allah kabel (di udara itu bisa di bawah (tanah) semua,” lanjutnya.

Jajarannya, kata Hari, menargetkan untuk menurunkan 100-200 kilometer kabel di Ibu Kota pada 2023. Ratusan kilometer kabel yang akan diturunkan ini terletak di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat.

Bina Marga DKI Jakarta, menurut dia, bakal menurunkan kabel yang menyambung 400 tiang PLN dalam waktu dekat.

“Tahun ini kami targetnya 200 kilometer (kabel diturunkan). Lokasinya tersebar di empat wilayah baik Pusat, Timur, Barat, Selatan, yang Utara belum,” sebut Hari. ● yan



FOTO: ANT

PENJUALAN JAS HUJAN MATRAMAN

Pedagang jas hujan merapikan dagangannya di Jalan Matraman, Jakarta, Rabu (4/1). Memasuki musim penghujan, penjualan jas hujan di kawasan tersebut mulai mengalami peningkatan 5 kali lipat dengan harga jual Rp60 ribu sampai Rp300 ribu.

Wali Kota Depok Ungkap Alasan Perda Garasi Direvisi

DEPOK (IM) - Pemkot Depok akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal garasi. Alasannya perda tersebut kurang maksimal karena masih banyak pemilik kendaraan tidak punya garasi.

“Ditinjau kembali. Diskonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan karena hasil evaluasi di lapangan efektivitasnya kurang,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Alun-Alun Kota Depok, Rabu (4/1).

Aturan mengenai kewajiban memiliki garasi bagi pemilik kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 34A Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan. Perda tersebut disahkan tahun 2020.

“Sudah bisa dijalankan. Cuma efektivitasnya kurang karena tempat-tempat yang memang realitasnya sulit mendapatkan parkir,” katanya.

Kendala penerapan perda

yaitu lahan parkir karena tidak semua pemilik kendaraan punya lahan parkir. Sedangkan, Pemkot Depok terkendala dalam upaya menekan pembatasan kendaraan bermotor. “Pembatasan mobil yang dimiliki warga tidak bisa menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ini hak privasi sehingga mereka masih sulit mendapatkannya,” ujar Idris.

Pihaknya sedang memikirkan menyiapkan lahan parkir yang efektif. Dengan demikian, saat perda dijalankan dan sarana sudah ada maka efektivitasnya menjadi maksimal. “Solusinya bagaimana kita menyiapkan tempat parkir milik pemerintah atau pihak ketiga untuk bisa disediakan,” ucapnya.

Saat ini, sebenarnya perda bisa dijalankan tapi sanksi menjadi tidak maksimal sehingga perda tersebut kemungkinan akan direvisi sesuai kajian lapangan.

“Kalau tidak efektif, sanksi akan dipertimbangkan juga. Perdanya sedang direvisi,” ujarnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PENEMPATAN JPO DI TENGAH JALAN

Kendaraan melintas di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta, Rabu (4/1). Dinas Bina Marga DKI Jakarta masih berkoordinasi dengan pihak pengembang mengenai kelanjutan JPO Dewi Sartika masih berada di tengah jalan.

PEGAWAI USIA DI ATAS 56 TAHUN KONTRAKNYA BERAKHIR

Pemprov DKI: Posisi PJLP Bisa Digantikan Keluarga atau Anak

Ratusan pegawai PJLP di lingkungan SKPD Pemprov DKI yang berusia di atas 56 tahun kontraknya resmi berakhir sejak 1 Januari 2023. Namun, pimpinan sejumlah SKPD itu menawarkan agar posisi pegawai usia tua yang selesai kontraknya bisa diisi oleh keluarga maupun anaknya.

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan aturan batas usia untuk pegawai kategori Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun sejak 1 Januari lalu. Sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov DKI menawarkan agar posisi

pegawai usia tua bisa diisi oleh keluarga maupun anaknya. “Karena kan kami tawarin ‘Kalau anaknya bapak ada nggak? Kalau ada ya sudah anaknya masuk’. Jadi, sesuai memang kami fasilitasi,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho

saat ditemui di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (4/1).

Hari menjelaskan setidaknya ada 100 pegawai PJLP usia di atas 56 tahun yang kontraknya resmi berakhir. Meski begitu, Hari mengklaim tak ada gejolak di lingkungannya terkait aturan pembatasan usia ini.

“Kalau karena batas usia mungkin hampir sekitar 100-an, namun kan nggak ada gejolak atau masalah,” jelasnya.

Posisi yang sama juga ditawarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta. Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto berjanji akan mengizinkan posisi PJLP tua digantikan oleh anak-anaknya. “Jadi tidak semuanya di-

berhentikan, kalau memang mereka minta bisa digantikan oleh anaknya, oleh keluarganya, itu bisa kita coba proses,” ujar Asep.

Setidaknya sebanyak 600 PJLP di lingkungan Dinas LH DKI Jakarta yang kontraknya telah berakhir per 31 Desember lalu.

“Pak Gubernur menyempatkan waktu 56, 57, masih bisa. Tapi kalau ada yang 60, 70, tahun lebih baik memang di rumahlah. Kita juga memahami produktifitas berbeda dengan yang 40, 30 tahun,” terangnya.

Asep menyampaikan, usia 56 tahun merupakan batas usia produktif tenaga kerja. Selain itu, ada aturan batas usia penerima yang tercantum dalam persyaratan penerima jaminan kesehatan.

“BPJS itu mensyaratkan 56 tahun. Jadi mau tidak mau juga, supaya bisa tercover baik oleh BPJS, maka batas usianya adalah 56 tahun,” imbuhnya.

Untuk diketahui, ketentuan batas usia PJLP tertuang dalam Keputusan Gubernur (Keppub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman

Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan. Selanjutnya, DKI akan membentuk Tim Pengendalian Penggunaan PJLP yang diketuai oleh dirinya sendiri.

“Dalam pembentukannya, terdapat tugas dan wewenang untuk memantau pengelolaan PJLP, verifikasi, dan validasi analisis pekerjaan, analisis beban kerja, risiko pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan PJLP. Ini dilakukan untuk pengoptimalan pelaksanaan Keppub yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023,” terangnya.

Adapun, klasifikasi pekerjaan PJLP yang diatur dalam Keppub tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang sesuai untuk Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif, terdiri dari Tenaga Lapangan Umum, seperti petugas mekanikal elektrik, petugas kebersihan dalam dan luar gedung, keamanan, pemulsaan jenazah, pengemudi, dan lain sebagainya. Sementara untuk Tenaga Teknis seperti petugas kesehatan satwa, pengolahan data pengukuran, arsitek perizinan, customer relation, dan lain sebagainya. ● yan

Waswas Lintasi Jalur Tengkorak Pelabuhan Sunda Kelapa

JAKARTA (IM) - Salah satu warga bernama Ibnu (27), merasa khawatir saat melintas di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, di depan Pelabuhan Sunda Kelapa. Pasalnya, ruas jalan itu kerap menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh, bahkan sampai terlindas truk.

“Sebagai pengguna jalan, rawan sih Jalan Lodan Raya ini soalnya banyak truk tronton, truk-truk bawa petikemas dari Pelabuhan Sunda Kelapa banget di depannya ada jalur padat kendaraan,” kata Ibnu saat ditemui, Rabu (4/1).

Meski merasa khawatir, pria yang sehari-hari bekerja di daerah Ancol, Jakarta Utara, ini tak memiliki alternatif jalan lain. Sehingga, mau tak mau dia harus melintasi Jalan Lodan Raya menggunakan sepeda motornya untuk bekerja.

“Kalau di Jakarta Utara pasti khawatir karena jalur utama kayak gini untuk jalur tronton, tapi enggak ada pilihan (jalan) lain,” imbuh dia.

Ibnu sendiri pernah terpeleket di jalan tersebut, meski tak sampai mengalami luka-luka. Sepengetahuannya,

kecelakaan lalu lintas kerap terjadi di Jalan Lodan Raya di depan Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada 2022, misalnya, dia sempat melihat kecelakaan yang melibatkan pengendara motor dengan truk tronton. Ibnu tak mengingat jelas waktu kejadian, tetapi saat itu pengendara motor terjatuh lalu terlindas tronton hingga meninggal dunia.

“Kalau selama 2022 dua kali kayaknya (terjadi kecelakaan) dan itu waktunya berdekatan, selang seminggu. Bulannya saya lupa, jatuh di sini terus kelindes sama truk yang lagi jalan dari arah Pluit ke Ancol,” ucap Ibnu.

Ibnu pun berharap agar ada jalur khusus bagi kendaraan kecil untuk bisa melintas di jalan tersebut. Sehingga, kejadian serupa tak berulang kembali.

Anto (33), salah satu pedagang yang tiap harinya berjualan tak jauh dari Pelabuhan Sunda Kelapa, juga mengonfirmasi kerap terjadinya kecelakaan sepeda motor di Jalan Lodan Raya.

Selama setahun terakhir, ia menyaksikan langsung seti-

daknya ada tiga pengendara motor tewas usai terlindas.

Menurut Anto, jalanan yang berpasir dan licin membuat pengendara sering terpeleket. Banyaknya pasir di jalan itu diduga berasal dari truk bermuatan besar yang berlalu-lalang. “Pasti ada aja yang kelindes. Setahun bisa tiga orang yang kelindes depan sini,” kata Anto.

Berdasarkan catatan, ada sejumlah kecelakaan yang terjadi di lokasi ini. Pada Jumat (7/10/22), seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia di depan pintu masuk Pelabuhan Sunda. Korban berinisial AN (51) itu mengembuskan napas terakhir usai terlindas truk kontainer. Truk yang mengangkut asbes tersebut menabrak dan melindas korban, sekitar pukul 14.30 WIB.

Kemudian pada Jumat (14/10/22) malam, penumpang sepeda motor tewas terlindas truk di ruas jalan tersebut. Korban yang diketahui berinisial IR mengalami luka parah di kepala, dan langsung meninggal dunia di tempat. ● yan



FOTO: ANT

KEBAKARAN BBPVP CEVEST BEKASI

Seorang pekerja berjalannya melintasi ruangan creative room Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Cevest usai kebakaran di Bekasi, Rabu (4/1). Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik terjadi pukul 05.00 WIB dan petugas mengerahkan sebanyak 10 mobil pemadam kebakaran.

Pengamat: Jika Mau Buat Sumur Resapan, Rencanakan Lebih Matang

JAKARTA (IM) - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai, perencanaan dan pembangunan sumur resapan yang diinisiasi pada masa pemerintahan sebelumnya tidak matang.

Alih-alih menyelesaikan persoalan banjir di DKI Jakarta, dia menyebut, jika sumur resapan era Anies, membahayakan para pengendara.

“Sumur resapan yang di tengah jalan, jadi jeblos karena dilintasi kendaraan. Kalau membahayakan, jangan dibiarkan,” kata Nirwono ketika dihubungi, Rabu (4/1).

Dia menjelaskan, lokasi sumur resapan yang tidak masuk akal ada di trotoar, tepi jalan dan tengah jalan dengan kekuatan yang tidak bisa membanding volume atau massa kendaraan berat. Demikian, dia menyebut bahwa efektivitas sumur resapan di DKI tidak lebih dari 20 persen yang berfungsi.

“Karena efektivitas rendah dan membahayakan pengendara, menjadi alasan kuat mengapa DKI harus berani mengevaluasi dan bahkan membongkar sumur resapan yang tidak efektif,” kata dia.

Nirwono menambahkan, alasan penempatan di trotoar, tepi jalan dan tengah jalan tidak efektif, karena kekuatan yang tidak sebanding dengan kendaraan dan lokasi tepat di atas jaringan utilitas berisi kabel-kabel. Sehingga, justru menghambat dan tidak memaksimalkan fungsi sumur resapan yang ada. Karenanya, dirinya

mengusulkan agar sumur resapan bisa dikaji ulang dan ditempatkan di lokasi yang mendukung untuk ditempatkan.

“Pelajarannya, kalau mau membuat sumur resapan, buat rencana yang lebih terperosok di salah satu sumur resapan yang ada di Jakarta Pusat. Dicuitkan oleh komposer Addie MS melalui akun twitternya, peristiwa itu terjadi di Jalan Batu Ceper pada akhir tahun lalu, Sabtu (31/12).

Berdasarkan pantauan, di lokasi tersebut memang terdapat banyak sumur resapan. Meski tertutup dengan beton, sumur resapan yang ada tampak tidak rata dengan jalan. Secara umum, di sepanjang jalanan tersebut, terdapat puluhan sumur resapan yang lokasinya berdekatan, maupun berjauhan.

Sementara, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan, kerusakan atau amblesnya sumur resapan di DKI, khususnya yang terjadi di belakang Istana Negara, Jalan Batu Ceper Raya, Gambir, sedang diperbaiki. Alasan jalan yang rusak atau tidak efektif, dia klaim karena ada pelaksanaan long storage pompa.

“Ada relokasi utilitas. Nanti kita rapikan,” kata Yusmada. ● yan

OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG
Selasa - Rabu, 10 - 11 Januari 2023	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 12 Januari 2023	11.00 s/d Selesai
Selasa - Rabu, 17 - 18 Januari 2023	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 19 Januari 2023	11.00 s/d Selesai
Selasa - Rabu, 24 - 25 Januari 2023	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 26 Januari 2023	11.00 s/d Selesai

LOKASI OPEN HOUSE & LELANG

Jl. Pajene Raya No.39 RT. 07 RW.08, Petungkang Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan

SYARAT & KETENTUAN LELANG :

- Peminat LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyerahkan uang jaminan sebesar:
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NIMPL MOBIL
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NIMPL MOTOR
- Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya ('as is')
- Uang jaminan dan Pelunasan disetorkan ke rekening a/n PT. Power Asetindo Selaras A/C no. 571099971 di BCA cab. Kyal Caringin, Jakarta Pusat.
- Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah lelang maka pemenang lelang dinyatakan WAKUPRESISTO dan UANG JAMINAN AKAN HANGUS
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Asetindo Selaras,
 - Telp : 062212163003 / 08567899576 / 08139986569

Email : powerteam@power-auction.id
PANITIA LELANG